

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara**

TESIS

OLEH

**DIAN JATIKUSUMA
NPM. 201801017**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**DIAN JATIKUSUMA
NPM. 201801017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

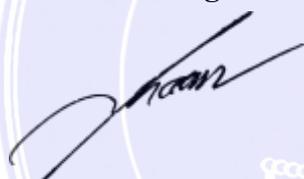
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

N a m a : Dian Jatikusuma

N I M : 201801017

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 05 September 2023

Nama : Dian Jatikusuma

NPM : 201801017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Yusniar Lubis, MMA
Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Agus Tripriyono, Akl. M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2023

Yang menyatakan



Dian Jatikusuma

Dian Jatikusuma



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Jatikusuma
NPM : 201801017
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

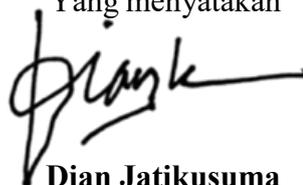
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Dian Jatikusuma

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of differences between the quantity, quality of work, timeliness and employee performance before the implementation of the Electronic Based Government System and the quantity, quality of work, timeliness and employee performance after e-government based at the Department of Industry and Trade North Sumatra Province. To analyze the research objectives, the 3 dimensions of performance contained in Dharma theory are used: namely, quantity of work, quality of work and timeliness. This study uses a quantitative approach, because in this study the relationship between variables is causal and in addition to testing the hypothesis between competency variables on performance. While the type of research used is included in the explanatory research type. namely research that is used to obtain data from certain places, using questionnaires as primary data.

The results of the study found that the Implementation of Electronic-Based Government Systems gave increased performance based on the aspect of work quantity; provide performance improvement based on work quality aspects; provide performance improvement based on timeliness aspect; and provide performance improvement based on employee performance aspects.

Keywords: Effect; Application; Electronic Based Government System; Employee Performance Improvement.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara kuantitas, kualitas kerja, ketepatan waktu dan kinerja pegawai sebelum Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan kuantitas, kualitas kerja, ketepatan waktu dan kinerja pegawai sesudah berbasis e-government di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Untuk menganalisis tujuan penelitian, maka digunakan 3 dimensi kinerja yang terdapat dalam teori Dharma yaitu: kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini hubungan antara variabel bersifat sebab-akibat dan selain itu untuk menguji hipotesis antara variabel kompetensi terhadap kinerja. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan termasuk pada tipe penelitian explanatory, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu, dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer/ utama.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberi peningkatan kinerja berdasarkan aspek kuantitas kerja; memberi peningkatan kinerja berdasarkan aspek kualitas kerja; memberi peningkatan kinerja berdasarkan aspek ketepatan waktu; dan memberi peningkatan kinerja berdasarkan aspek kinerja pegawai.

Kata Kunci: Pengaruh; Penerapan; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peningkatan Kinerja Pegawai.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dian Jatikusuma, dilahirkan di Medan, pada tanggal 14 Oktober 1975. Sejak remaja, saya telah menunjukkan minat yang kuat dalam Pemerintahan dan Administrasi Publik. Minat ini terus berkembang seiring dengan pendidikan formal yang saya jalani.

Pendidikan saya di jenjang perguruan tinggi adalah di IST AKPRIND Yogyakarta dengan mengambil program studi Teknik Industri. Di sini, saya tidak hanya mendalami ilmu tentang Teknik Industri, tetapi juga terlibat dalam organisasi HMI dan Forum Lingkaran Pena.

Setelah lulus dengan gelar ST dari IST AKPRIND Yogyakarta, saya memulai karir profesional saya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Di sini, saya bekerja sebagai Kasubbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, dan tanggung jawab saya meliputi adalah merencanakan, mengevaluasi dan mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan dinas. Pengalaman kerja ini mengasah keterampilan saya dalam Administrasi Publik dan memberi wawasan lebih dalam tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selama perjalanan karir saya, minat saya terhadap Administrasi Publik semakin menguat. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke tingkat yang lebih tinggi dengan mendaftar sebagai mahasiswa pascasarjana di Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. Saat ini, saya sedang fokus dalam penelitian mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengaruh SPBE terhadap peningkatan kinerja pegawai.

Riwayat hidup saya yang beragam, dari pendidikan hingga pengalaman profesional, telah membentuk pandangan dan pemahaman saya tentang Administrasi Publik. Saya berharap bahwa melalui tesis ini, saya dapat berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dalam Administrasi Publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melindungi, menuntun dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Adapun judul tesis ini adalah **“Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

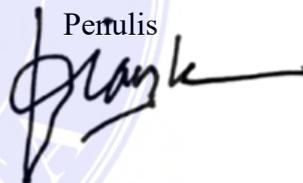
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan banyak saran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian.

6. Kepada Kepala Bidang dan Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti.
7. Keluarga yang tercinta, istri saya Feni Firdaningrum, anak-anak saya Anindya Keiko Luvena, Muhammad Umar Tsaqib, Maziidatul Khairah Zahraa dan Aisyah Shidqiya Myesha, yang selalu menjadi semangat dan juga mendorong untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas A Program Studi Magister Administrasi Publik 2020 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, April 2023

Penulis

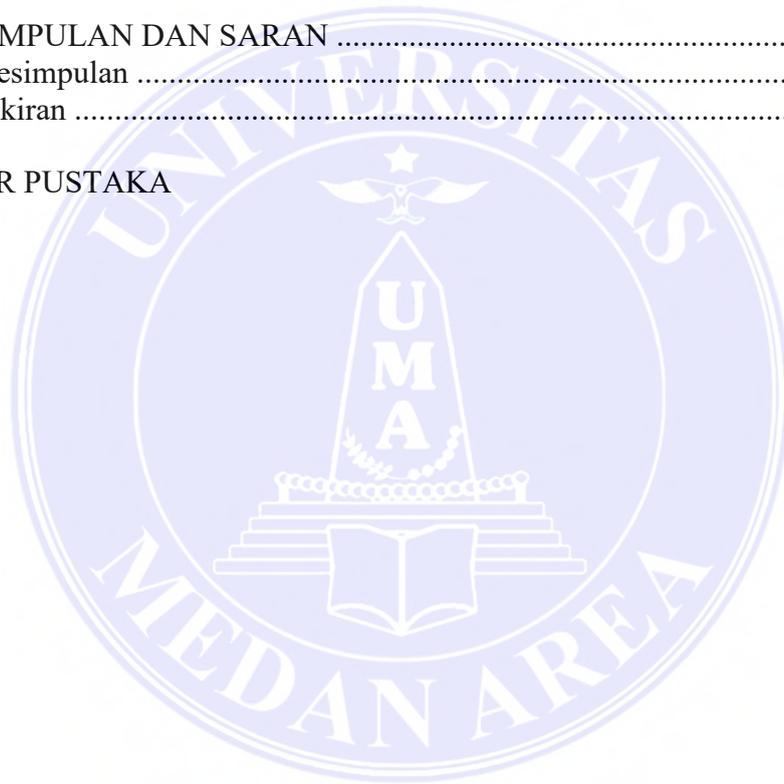


Dian Jatikusuma

DAFTAR ISI

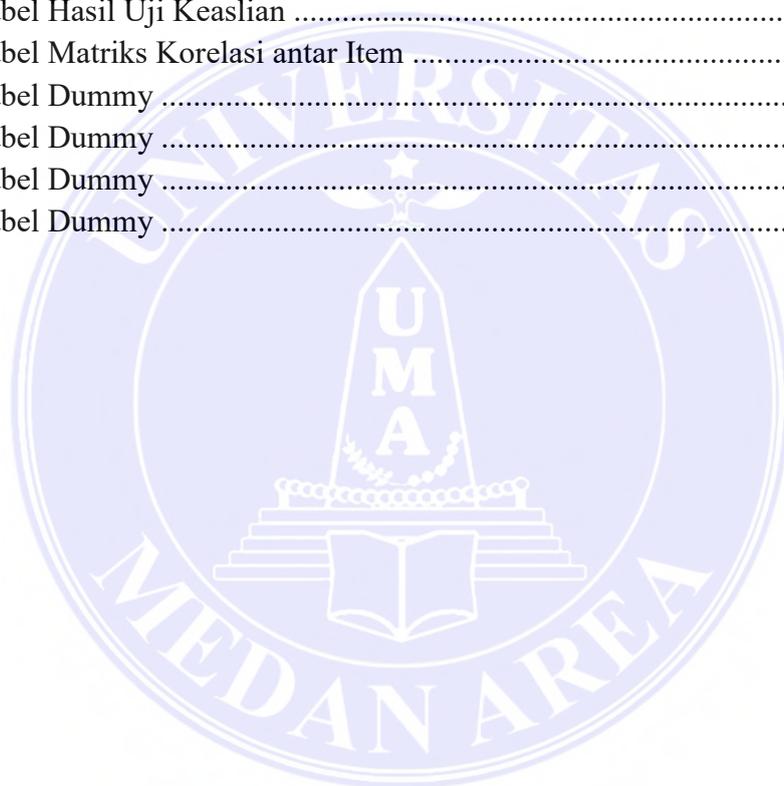
	Halaman
ABSTRACT.....	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	2
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Keunggulan Riset.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Elektronik Government.....	10
2.1.1. Definisi e-Government.....	10
2.1.2. Tujuan e-Government.....	17
2.1.3. Keunggulan e-Government.....	20
2.2. Hipotesis Penelitian	43
III. METODELOGI PENELITIAN	45
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2. Definisi Terapan dan Definisi Praktis	45
3.2.1. Definisi Hipotetis	46
3.2.2. Definisi yang Berguna	47
3.3. Populasi dan Sampel	48
3.3.1. Populasi	48
3.3.2. Tes	48
3.3.3. Jenis dan Mata Air Data	49
3.3.4. Metodologi Penyusunan Data	50
3.4. Teknik Pengolahan Data	51
3.5. Uji Instrumen Penelitian	52
3.6. Teknik Analisis Data	56
3.7. Pengujian Hipotesis.....	61
IV. HASIL PENELITIAN	
4.1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai.....	62
4.2. Konsekuensi Penanganan Informasi.....	66
4.2.1. Kajian Dampak Kontras Antara Pekerjaan Sebelum Pelaksanaan Kerangka	66
4.2.2. Perbedaan yang signifikan antara kualitas kerja sebelum	67

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan kualitas kerja sesudah Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	
4.2.3. Perbedaan yang tidak biasa antara idealitas sebelum pelaksanaan eksekusi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan akal sehat setelah pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	69
4.2.4. Diferensiasi yang sangat besar antara eksekusi agen sebelum didirikan e-government dan eksekusi buruh setelah Pelaksanaan Sistem Administrasi Elektronik (SPBE)	72
V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Pikiran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Definisi Operasional Penelitian.....	47
2. Tabel Skala Likert	51
3. Tabel Skala Likert Hasil Klasifikasi	51
4. Tabel asisten harga Pearson Second r	54
5. Tabel asisten harga Pearson Second r lanjutan	54
6. Tabel Hasil uji keandalan instrumen	56
7. Tabel Hasil Uji Keaslian	67
8. Tabel Matriks Korelasi antar Item	69
9. Tabel Dummy	71
10. Tabel Dummy	73
11. Tabel Dummy	75
12. Tabel Dummy	76



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar Kendala Dalam pelaksanaan e-Government	3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Globalisasi adalah eksentrisitas di mana negara-negara di dunia secara langsung atau tidak langsung mengantisipasi bahwa upaya terkoordinasi antar manusia harus lebih praktis dan berhasil daripada waktu lainnya. Saat ini peningkatan kemajuan informasi dan persuratan telah berkembang pesat. Pergaulan yang menyeluruh ini telah mengubah contoh korespondensi antar individu di dunia ini tanpa mengenal batas wilayah, suku, negara maupun usia. Kita dapat melihat pentingnya kenyamanan mendapatkan informasi dari berbagai tempat di dunia pada awalnya. Namun, tidak hanya individu yang terkena dampak, banyak afiliasi tingkat tinggi yang memanfaatkan kemajuan informasi ini dalam organisasi untuk menggerakkan roda afiliasi mereka. Saat ini, banyak asosiasi manajerial yang melakukan implementasi kebijakan melalui kemajuan informasi dan korespondensi, yang kita kenal sebagai e-government.

Sebagai negara non-industri, pemanfaatan e-government di Indonesia kurang menarik meskipun organisasi publik telah berupaya untuk merencanakan berbagai pedoman dan aturan yang terkait dengan pengembangan informasi. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, misalnya, aplikasi e-government Indonesia masih tertinggal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penanguhan ini, dan tentu saja yang paling tegas adalah tidak ada komitmen untuk mengurangi kesenjangan otomatis kami dengan negara-negara

maju seperti konsep SDM, sistem, dan keadaan geografis yang sulit.

Pemanfaatan tata kelola yang baik tentunya memiliki gagasan untuk pemerintahan yang lebih terbuka di daerah. Untuk mencapai hal ini, spesialis publik perlu bekerja di dalam sistem administrasi yang sedang berjalan. Salah satunya adalah Undang-Undang Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan dan Kerangka Pengembangan E-Government telah mempersiapkan setiap Bupati dan Pejabat/Administrasi untuk mengambil langkah signifikan sesuai dengan komitmen, kapasitas dan penguasaan masing-masing. menyelesaikan pemutakhiran e-government yang luas, mengingat Kabupaten Sistem Tanggamus. Usaha pemerintah daerah melalui satker bersama Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah Badan Otorita adalah mengarahkan kekayaan daerah yang memuat hak dan tanggung jawab masing-masing daerah yang terkait dengan penguasaan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang melimpah. terkait dengan kehormatan dan komitmen teritorial. Ingat bahwa untuk penyelenggaraan Aset Biasa adalah untuk menyelesaikan kegiatan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pengaturan, deklarasi, dan tanggung jawab aset lokal.

Pemanfaatan e-government pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang lebih mahir, partisipatif, adil, sebagian besar, jernih dan berwawasan bila dijunjung tinggi oleh negara-negara maju. struktur perangkat negara, yang mengandalkan tingkat kesehatan mental yang serius. Pakar publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut memahami bahwa e-government sangat besar dalam perubahan pemerintahan yang sedang berlangsung. Kepercayaan yang muncul

adalah bahwa pelaksanaan e-government akan memberikan bantuan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya terbilang sulit, karena membutuhkan siklus dan tahapan seperti penanganan pelaksanaan yang berwibawa.

Eksekusi sendiri merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dengan mengetahui tujuan, sasaran, misi dan visi afiliasi. Eksekusi dapat diketahui apakah individu atau kelompok telah menetapkan model pencapaian, dan menetapkan pencapaian ini sebagai tujuan atau konsentrasi yang masuk akal untuk dicapai. Tanpa tujuan atau sasaran, sulit untuk mengetahui pameran orang atau afiliasi karena tidak ada tolok ukur. Di daerah terbuka, pelaksanaan lebih digarisbawahi dan membutuhkan hasil akhir yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. oleh karena itu afiliasi membutuhkan agen yang benar-benar siap untuk menyelesaikan komitmen mereka dengan sukses, menguntungkan, nyata, luar biasa dan diperlengkapi, sehingga mereka dapat bekerja dengan hasil yang ideal. Diantisipasi bahwa batas harus menyelesaikan pekerjaan adalah satu-satunya eksekusi delegasi tersembunyi nama merek. Batasan ini adalah pola pikir dan perilaku, namun data dan kapasitas.

Menurut Hery Abdul Aziz (2008) ada kendala atau rintangan dalam pelaksanaan e-government

Gambar 1. Kendala Dalam pelaksanaan e-Government



Adapun penyebab frustasinya kemajuan e-government di Indonesia, kebetulan sumber permasalahannya umumnya tidak terkait dengan keterbukaan inovasi informasi. Diagram di atas menunjukkan bahwa isu-isu yang muncul dalam kemajuan e-government di tingkat pusat dan teritorial terjalin antara isu-isu peningkatan institusi, otoritas dan cara hidup masyarakat umum kita. Harus diakui bahwa keterbukaan pembangunan, sebagaimana terangkum dalam persoalan sistem, masih menjadi kebutuhan dalam banyak hal di negara-negara agraris. e-government membutuhkan pengembangan satelit, asosiasi daya, asosiasi komunikasi, pengadaan PC di instansi pemerintah bersama dengan struktur dukungan yang kuat yang dapat diakses dengan cara yang sama di seluruh wilayah. Namun, untuk sebagian besar daerah, keterbatasan yang menyebabkan kekecewaan terhadap pelaksanaan e-government di Indonesia dapat muncul dari variabel manajerial. Faktor ini dipengaruhi oleh konflik antara kebijakan pemerintah pusat dan organisasi lingkungan yang dijalankan negara, pedoman yang masih lemah dalam membantu, tidak adanya pengaturan anggaran, sistem standarisasi yang tidak jelas, yang masih terhanyut oleh tugas perintis atau ahli. untuk eksekusi. dari e-Government. Saat ini, sudah banyak bukti bahwa pemanfaatan e-government yang berhasil di daerah masih menjadi kewajiban direktur delegasi, pejabat atau kepala kota di ruang yang bersangkutan. Contoh keberhasilan pelaksanaan e-government dalam iklim pemerintahan daerah Takalar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sragen dan Kebumen di Jawa Tengah, atau di kota Surabaya, memperkuat bukti betapa pentingnya faktor kekuatan dalam menentukan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. keluar dan memanfaatkan

e-government.

Demikian pula, hal yang sangat mendasar yang mengharapkan solidaritas berubah adalah bagian sosial. Sangat mudah bagi aparaturnya di Indonesia untuk mendekati kemajuan, dan banyak juga yang memiliki visi untuk membuat pemerintahan elektronik. Namun, persoalannya, pemanfaatan e-government seringkali berbenturan dengan variabel sosial yang goyah. Variabel sosial di antara pegawai pemerintah dalam asosiasi pemerintah inilah yang sering menyebabkan tidak adanya pertimbangan dan semangat akan pentingnya e-government. yang sering muncul adalah ketegangan atau ketegangan irasional bahwa aplikasi e-government akan menyabot posisi yang telah ditetapkan. Kita juga sering melihat bahwa perpaduan organisasi negara bagian, departemen dan non departemen masih terkendala karena masing-masing tidak mau berbagi data dan informasi. Ini adalah hambatan yang paling mendasar untuk pelaksanaan nyata e-government.

Pemanfaatan e-government, khususnya selama waktu yang dihabiskan untuk memberikan rencana keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, tentu menghadapi kendala tersebut. Dengan adanya kebutuhan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumut berusaha untuk membuat struktur pemerintahan yang dapat diandalkan menerima perbaikan dan permintaan dari orang-orang yang terlibat erat dengan bantuan dari para ahli yang memiliki kemampuan dan kinerja yang luar biasa karena pendidikan yang memadai. juga, bersiaplah.

Adanya segudang nilai yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh

kemampuan alat tersebut dikhawatirkan dapat menjalankan pedoman regulasi yang baik dalam mengawasi pemerintahan dan pengelolaan kebijakan. Dalam melakukan e-government, suatu asosiasi manajerial tidak dapat dipisahkan dari pengaruh pekerjaan delegasi di dalam asosiasi tersebut, sehingga akan terjadi suatu hubungan. antara pelaksanaan e-government pada pengenalan agen dalam asosiasi manajerial. yang dalam hal ini, pelaksanaan perwakilan adalah titik jalan untuk mendorong pelaksanaan e-government. Hal ini juga sesuai dengan salah satu pemikiran dari e-government itu sendiri, khususnya “Government to agent: akhirnya, aplikasi e-government juga dibutuhkan untuk menangani pengenalan pemerintah dan bantuan dari delegasi atau agen pemerintah yang bekerja di asosiasi yang berbeda sebagai buruh lokal” (Indrajit, 2006: 41). Dengan sertifikasi ini, ada keterkaitan antara penyelenggaraan e-government dan penyelenggaraan asosiasi pemerintahan hingga masyarakat umum secara keseluruhan. Dimana pengenalan delegasi pemerintah adalah subjek dari pendekatan yang paling terkenal untuk mengawasi kekuasaan publik itu sendiri. Untuk dapat memulai e-government, tentu saja, jangan harap semua ahli dan organisasi akan siap. Dengan perencanaan yang hati-hati, spesialis publik telah mulai mempertimbangkan untuk melaksanakan penggerak e-government bahkan dari tahap yang paling sulit sekalipun.

Lingkungan Kerja Modern dan Dagang Teritorial Sumut memanfaatkan Struktur Informasi Organisasi Penerapan Lingkungan (SIMDA) selama waktu yang dihabiskan untuk mencari rencana penggunaan diupayakan untuk dilakukankeluar e-government. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Dharma, 2003:355) ada 3 komponen pelaksanaan secara eksplisit, ukuran kerja, sifat kerja

dan optimisme. Selanjutnya, para penguji tertarik untuk mengarahkan ujian mengemudi dengan mencoba melihat kontras dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Penyelenggaraan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menggunakan tiga bagian pertunjukan.

Melihat data tersebut di atas, maka penguji tertarik untuk mengkoordinasikan evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sumut dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kuantitas kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kualitas kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap ketepatan waktu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap

kinerja pegawai di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sasaran eksplorasi ini adalah:

1. Memutuskan dampak Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap jumlah pekerjaan di Bidang Perindustrian dan Pertukaran Wilayah Sumatera Utara.
2. Memutuskan dampak Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap sifat pekerjaan di Cabang Perindustrian dan Bursa Wilayah Sumatera Utara.
3. Memutuskan dampak Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap idealisme pada Dinas Perindustrian dan Pertukaran Wilayah Sumatera Utara.
4. Memutuskan dampak Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pameran tenaga kerja di Dinas Perindustrian dan Pertukaran Wilayah Sumatera Utara.

1.4. Keunggulan Riset

Manfaat dari penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat spekulatif dari investigasi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ujian e-government dan latihan kerja.

2. Realistic greatness, evaluasi ini seharusnya merupakan komitmen untuk memberikan informasi dan data yang tepat tentang pengaruh pelaksanaan SPBE terhadap pelaksanaan pekerjaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sumatera Utara. Lebih dari itu, para peneliti menerima bahwa hasil eksplorasi ini dapat menjadi penilaian serta pekerjaan untuk memikirkan perubahan untuk Negara-negara Regional lainnya dengan tujuan definitif untuk menangani gagasan organisasi yang ada di semua badan pemerintahan Tipikal/Kota/Sistem. seluruh Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Elektronik Government (e-government)

2.1.1. Definisi E- Government

Informasi dalam masa pengakuannya yang berkelanjutan telah berkembang begitu cepat sehingga saat ini tidak diurai sebagai cara untuk memberikan informasi kepada orang-orang dan masyarakat umum, namun telah menjadi kekuatan penentu yang dominan. Adapun organisasi, demonstrasi menyampaikan informasi adalah bagian penting. Melalui informasi yang disusun secara hati-hati dan tegas, masyarakat akan memahami analisis bantuan yang diberikan ketika teknik perbaikan dilakukan. Begitu pula sebaliknya, apabila informasi yang disampaikan tidak terlihat dan tidak jelas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan masyarakat. Pakar publik sangat mengkhawatirkan hal ini. akibatnya spesialis terbuka mengambil kursus alternatif. Salah satunya dengan menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang sering disebut dengan e-government.

E-government adalah dorongan yang didukung warga dengan tujuan pasti untuk mendorong e-organisasi dan membuat perubahan untuk bekerja dengan kebijakan strategis lingkungan. Melalui kemajuan e-government, spesialis publik percaya bahwa sistem dan siklus kerja yang otoritatif dapat diselesaikan di dalam spesialis negara dan terbuka bebas dengan memperluas penggunaan perkembangan informasi dan korespondensi. E-government dapat digambarkan dalam berbagai cara mengingat cara yang pada dasarnya e-government dapat

memperkenalkan dirinya dalam berbagai desain dan tingkatan. Ada berbagai implikasi dari e-government, bergantung pada sudut pandang mana yang menggambarannya dan tingkat penyempurnaan yang ada. Dalam Peraturan Perintis Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Metodologi Publik dan Metodologi Memajukan e-government, yang dimaksud dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (pengembangan informasi dan persuratan). untuk juga mendorong latihan administrasi yang setara dengan jaringan, organisasi bisnis, dan pertemuan. terkait dengan organisasi yang signifikan.

Bank Dunia (World Bank) dalam Adrianto (2007:46) menjelaskan e-government sebagai berikut:

"E-government mengacu pada penggunaan data mutakhir oleh asosiasi pemerintah, (misalnya, Asosiasi Area Luas, Web, dan pendaftaran seluler) yang dapat mengubah hubungan dengan penduduk, asosiasi, dan bagian lain dari pemerintahan." ("E-government menyarankan pemanfaatan kemajuan informasi oleh asosiasi pemerintah, (misalnya, Wide District Associations (WAN). Web, dan Flexible Figuring) yang dapat berdampak pada situasi dengan penduduk, asosiasi, dan lembaga pemerintah lainnya.") .

Itu. Pemerintah Publik AS dalam Adnanto (2007:46) menggambarannya sebagai berikut:

"e-government mengacu pada penyampaian data dan sen'ies pemerintah berbasis internet melalui Internet atau implikasi otomatis lainnya." (e-government menyinggung penyampaian informasi dan organisasi pemerintah online melalui

web atau media modern lainnya).

Tentu saja, UNDP (Uniteti Country Improvement Program) dalam Rifaiza (2007) menggambarannya secara lebih umum, khususnya: E-Government adalah penggunaan kemajuan informasi dan korespondensi (ICT-Information and Correspondence Development) oleh spesialis terbuka.

Sesuai O'Donnell et.all (2003:24) dalam Kukhman (2008). menggambarkan e-government sebagai:

"Pemanfaatan informasi pengumpulan terbuka dan kemajuan korespondensi (TIK) untuk menyampaikan data dan informasi kepada penduduk, di luar tugas hierarkis dan kaki tangan lainnya untuk melengkapi, mengganti, atau lebih jauh mendorong sistem kendaraan yang ada." (Penggunaan inovasi informasi dan korespondensi oleh badan-badan terbuka untuk menyampaikan informasi dan organisasi kepada masyarakat umum, afiliasi luar, kantor kelompok dan kaki tangan, dengan menciptakan kerangka kerja penyampaian informasi).

Setuju Adronafis (2009). dalam artikelnya yang berjudul E-Government: Berusaha Memahami Administrasi yang Berhati-Hati dan Langsung, pada dasarnya e-government adalah pemanfaatan internet untuk menyelesaikan urusan pemerintah dan menangani jenis administrasi terbuka yang lebih baik seperti yang terletak pada organisasi lokal. Konsisten OECD (Hubungan untuk Organisasi Uang - pergerakan dan Kemajuan)

dalam Budiati (2004:11), pemacuan e-government adalah:

„E-government adalah penyampaian akses online dan jaringan lainnya, misalnya e-meeting; e-government identik dengan pemanfaatan TIK di

pemerintahan dengan pertimbangan untuk lebih mengembangkan penyampaian dan pemeliharaan serta setiap kegiatan manajerial, akhirnya, e-government adalah kemampuan untuk mengubah strategi dewan dengan memanfaatkan TIK, "(E-government adalah penyampaian layanan Internet, misalnya e-advising; e-government adalah penggunaan yang sama dari kemajuan informasi dan korespondensi di pemerintahan dengan penyampaian organisasi dan siklus dan semua organisasi berhasil: secara keseluruhan, e-government adalah perangkat untuk mengubah asosiasi publik melalui pengembangan informasi dan korespondensi).

Sementara itu. Dfind pedagang pemrograman seperti SAP (Structure Application and Things) dalam Indrajit (2006:2). Memiliki definisi yang menarik. khususnya: "E-government adalah peningkatan perubahan dunia untuk mendorong web saya oleh asosiasi pemerintah dan setiap orang yang mengawasinya". (E-government berubah di seluruh dunia untuk mendorong penggunaan web oleh negara dan pihak terkait).

Seperti yang dikemukakan oleh Syailendra (2008). dalam artikelnya yang berjudul Execution of E-government, terungkap bahwa e-government adalah struktur informasi otoritatif berbasis elektronik untuk membantu pakar publik dalam memberikan informasi, menawarkan berbagai bantuan publik. lebih lanjut, pertimbangkan perdagangan online baik ke berbagai asosiasi/asosiasi maupun ke lingkungan yang lebih berkualitas.

Mengingat Deklarasi Menteri Korespondensi dan Penerangan No. 8 Tahun 2004, objek penyelenggaraan aplikasi e-government dapat dibedakan menjadi 3

(tiga) golongan, yaitu:

1. Pemerintah ke Pemerintah

Aplikasi e-government di kelas ini mengawasi masalah otoritatif antar kantor pemerintahan atau mungkin antar negara. Berbagai organisasi dapat diberikan oleh satu kantor pemerintah ke satu kantor pemerintah lainnya sesuai komitmen dan komponen asosiasi atau yang ditunjukkan dengan kebutuhan koordinasi antar asosiasi. Secara umum, aplikasi jenis pemerintah-ke-pemerintah bekerja pada jaringan data yang dikenal sebagai intranet, yang merupakan jaringan data yang digunakan untuk kebutuhan internal organisasi pemerintah.

Aplikasi Instances of Government to Government digabungkan:

- A. Koordinasi dan perpaduan rencana pengeluaran;
- B. Koordinasi personel;
- C. Koordinasi pelaksanaan bidang moneter;
- D. Koordinasi upaya politik dan keamanan.

2. Pemerintah kepada Penghuni

Aplikasi e-government dalam karakterisasi ini membahas isu-isu yang terkait dengan organisasi yang sepenuhnya terbuka. baik penduduk Indonesia maupun warga negara luar. Instance aplikasi Government to Occupant meliputi:

A. Penduduk:

B. Pengembangan:

C. Surat nikah.

3. Pemerintah ke Bisnis

Aplikasi e-government di kelas ini membahas masalah yang terkait dengan organisasi di area bisnis. Kawasan bisnis secara keseluruhan dapat terdiri dari berbagai jenis asosiasi bisnis yang tak ada habisnya, baik publik maupun asing.

Contoh aplikasi Government to Business meliputi:

A. Porsi biaya:

B. izin bekerja;

C. Pengadaan barang dan pekerjaan (e-obtaining).

Sementara itu. Menurut Indrajit (2006:41) ada 4 pemikiran yang berlaku dalam e-government itu sendiri, yaitu:

1. Pemerintah kepada Penghuni

Dimana para ahli masyarakat berkumpul dan mengatur berbagai kemajuan informasi dengan maksud para ilmuwan untuk lebih membina hubungan dengan masyarakat sekitar.

2. Pemerintah ke Bisnis

Salah satu tugas utama suatu pemerintahan adalah menata lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian suatu negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Model adalah kerangka penawaran untuk proyek-proyek pemerintah termasuk daerah rahasia.

3. Pemerintah ke Pemerintah

Kepentingan untuk kolaborasi yang stabil antara satu pemerintah dan pemerintah lainnya tidak hanya berputar di sekitar masalah deklarasi, tetapi melampaui kerja sama.

4. Pemerintah ke Agen

Kemudian, aplikasi e-government juga dibutuhkan untuk melakukan pengenalan pemerintah dan bantuan dari perwakilan pemerintah atau pekerja yang bekerja di berbagai instansi sebagai otoritas teritorial.

Dalam Indrajit (2005:13). untuk perusahaan atau lingkungan tidak pernah menyelesaikan latihan e-government. Mencirikan tugas utama ini penting karena, meskipun bom upaya mengirim banyak drive yang berbeda di kemudian hari, itu akan sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat beberapa kemajuan penting sehubungan dengan penentuan proyek e-government yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan membatasi keharusan. Biasanya individu yang menjalankan e-government berangkat dari dua penyebab khusus:

1. Spesialis publik mengelola isu-isu eksplisit dimana aplikasi e-government dianggap siap untuk menyelesaikan isu-isu tersebut, atau
2. Otoritas publik berharap dapat memperkenalkan kemajuan siklus yang telah terjadi hingga saat ini.

Dari salah satu alasan tersebut, lahirlah apa yang disebut sebagai kebutuhan atau dasar bagi spesialis publik untuk memasukkan kemajuan informasi selama waktu yang dihabiskan untuk kegiatan sehari-hari.

2.1.2. Tujuan E-government

Dalam Berita Otoritas No. 3 Tahun 2003, peningkatan e-government adalah upaya untuk mendorong organisasi elektronik untuk bekerja sehubungan dengan gagasan implementasi kebijakan dengan cara yang asli dan mampu. Melalui e-government yang lebih baik, sistem dewan dan proses kerja di dalam spesialis terbuka dikelola untuk benar-benar memanfaatkan kemajuan informasi. Perkembangan penggunaan informasi mengkonsolidasikan 2 (dua) pekerjaan terkait, khususnya:

1. Mengurus data, papan informasi, melaksanakan struktur dan proses kerja secara elektronik;
2. Menggunakan dorongan dalam kemajuan informasi sehingga administrasi dapat diperoleh secara nyata dan sederhana oleh wilayah lokal yang lebih luas di seluruh pelosok tanah air.

Untuk melengkapi alasan yang telah disusun, pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Pendirian asosiasi informasi dan perdagangan nilai serta bantuan wilayah lokal yang luas yang dapat mencakup masyarakat yang lebih luas dapat dijangkau di seluruh Indonesia kapanpun tanpa dibatasi oleh batasan waktu dan dengan biaya yang wajar;
2. Mengkoordinasikan asosiasi yang bijaksana dengan dunia bisnis untuk memperluas pergantian peristiwa keuangan individu dan memperkuat

kapasitas untuk mengawasi perubahan dan persaingan dalam perdagangan dunia;

3. Kemajuan kerangka kerja dan saluran korespondensi dengan organisasi negara dan tindakan tempat kerja perdagangan publik untuk distrik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menentukan sistem negara;
4. Landasan struktur peraturan dan proses kerja yang langsung dan berguna dan bekerja dengan perdagangan dan organisasi antara asosiasi pemerintah dan negara teritorial bebas.

Sesuai Siallagan (2006), pada umumnya, tujuan yang ingin dicapai dengan menjalankan e-government adalah membuat on-web dan bukan klien in-line. E-government berarti menawarkan bantuan semacam ini tanpa perantara buruh bangunan publik dan sistem antrean panjang untuk mendapatkan bantuan segera. Dengan cara yang sama, e-government juga berarti membantu organisasi yang hebat. Penggunaan i Inovasi yang mempermudah individu untuk mendapatkan informasi dapat mengurangi kontaminasi dengan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab lembaga publik.

Untuk beberapa waktu, seperti yang ditunjukkan oleh Andri (2007). Kemungkinan e-government dilakukan dengan tujuan agar hubungan antara spesialis terbuka, baik dengan lokal maupun dengan direktur kas, dapat dilakukan dengan cara yang mampu, menarik dan moderat. Ini adalah prinsip yang mempertimbangkan komponen pembentuk masyarakat saat ini, sehingga para ahli terbuka harus memiliki pilihan untuk mengubah kapasitas mereka di dalam negara, sehingga orang dapat berpartisipasi dalam kehormatan mereka dan menyelesaikan tanggung jawab mereka dalam keharmonisan dan keamanan. yang

semuanya dapat dicapai dengan mengubah struktur dan spesialis publik itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya. Demikian pula, inspirasi yang mendorong pelaksanaan e-government adalah untuk mewujudkan organisasi yang hebat.

Dalam Suendjojo (2008). e-government bekerja dengan target berikut:

1. Landasan asosiasi informasi publik dan perdagangan bantuan yang tidak dibatasi oleh rencana permainan yang luas, dan dengan biaya yang masuk akal untuk lingkungan sekitar;
2. Mengendalikan hubungan yang cerdas dengan dunia usaha;
3. Rencana kerangka kerja dan saluran korespondensi dengan semua asosiasi negara dan tindakan tempat kerja perdagangan umum;
4. Landasan sistem manajerial dan proses kerja yang langsung dan kuat, serta bekerja dengan perdagangan dan organisasi antar asosiasi pemerintah.

Apalagi UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik, tegas pasal 4 (empat), tegasnya:

1. Menampilkan keberadaan negara dengan membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam bidang informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan ekonomi kerakyatan untuk lebih mendorong bantuan pemerintah perseorangan agar masyarakat dapat berkembang.
3. Menjamin kemajuan dan kecukupan implementasi kebijakan sehingga dapat berjalan sesuai dengan bentuknya.

4. Memperluas potensi yang sebesar-besarnya bagi lingkungan sekitar sehingga dapat menggunakan kemampuannya dalam bidang kemajuan.
5. Memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi klien dan pimpinan pengembangan informasi dengan tujuan agar mereka tidak dikuasai rasa takut dalam kerangka berpikir suatu kemajuan

2.1.3. Keunggulan E-government

Sesuai Al Butchery dan Tany Blair dalam Andrianto (2007:46) menyatakan bahwa ada 6 manfaat yang diperoleh dengan menjalankan e-government di suatu negara, antara lain:

1. Bekerja pada sifat asosiasi dukungan warga untuk antek-antek (pertemuan lokal, bisnis dan kalangan modern), khususnya sehubungan dengan kesesuaian kinerja dan kemampuan dalam keberadaan masyarakat alternatif.
2. Memperluas ketegasan, kontrol dan kewajiban pengaturan untuk menjalankan keyakinan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Pada dasarnya mengurangi biaya mutlak pergaulan, relasi dan pergaulan yang disebabkan oleh para ahli terbuka dan antek-anteknya karena alasan kegiatan sehari-hari.
4. Berikan pintu masuk yang fenomenal kepada spesialis publik untuk menciptakan jenis pendapatan baru melalui upaya terkoordinasi dengan menarik orang dengan kuat.
5. Membangun lingkungan di lingkungan lain dapat menjawab berbagai masalah yang dihadapi dengan cepat dan pasti sesuai perubahan di dunia dan contoh yang ada.

6. Memberlakukan berbagai acara sosial lingkungan sebagai aksesori pemerintah selama waktu yang dihabiskan menyebarkan teknik dengan cara yang tidak memihak dan berbasis suara.

Sementara itu, menurut Indrajit (2005: 4), suatu negara memutuskan untuk melaksanakan e-government karena merasa bahwa mengkonsolidasikan perkembangan informasi dalam kerangka public power board akan memberikan keuntungan yang berbeda sebagai berikut:

1. Mengerjakan gagasan asosiasi berbasis warga untuk keseluruhan populasi dan organisasi negara lainnya;
2. Memupuk lebih lanjut siklus keterusterangan dan tanggung jawab di antara direktur pemerintah;
3. Penurunan biaya perdagangan, korespondensi dan asosiasi yang terjadi dalam proses pemerintahan;
4. Membuat informasi yang lebih baik mengingat jaringan lingkungan: dll.

Sementara itu, menurut Soendjojo (200S), e-government seharusnya memberikan manfaat sebagai:

1. Organisasi lingkungan. Penyampaian bantuan yang lebih baik kepada masyarakat umum: informasi dari pakar publik dapat diperoleh selama 24 jam setiap hari. 7 hari setiap minggu tanpa percaya bahwa kantor organisasi akan dibuka. Informasi dari badan publik dapat dilihat dan diperoleh dari lingkungan kerja, rumah tanpa harus datang ke kantor badan publik sebenarnya.
2. Hubungan antara spesialis terbuka, populasi umum dan ahli mata pelajaran moneter, ada perluasan hubungan antara spesialis terbuka dan lokal dan pengelola kas. Kehadiran mentalitas responsif juga harus menumbuhkan

hubungan antara berbagai pengalaman; pengakuan akan menghilangkan pertanyaan, semuanya setara, dengan kekuatan publik.

3. Membentengi informasi lingkungan. Lingkungan dibantu oleh informasi yang diperoleh dengan mudah. Dengan informasi yang memadai, masyarakat mengetahui bagaimana menentukan pilihan dalam memperoleh informasi penting.
4. Eksekusi pemerintahan lebih kuat. Kehadiran e-government merupakan hal yang lumrah sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan lebih mudah berjalan mengingat fakta bahwa koordinasi manajerial mungkin mendapat manfaat dari beberapa intervensi oleh pengembangan informasi. Koordinasi dan perbincangan antara focal point pemerintah dan perintis wilayah dapat dilakukan tanpa harus berada di satu wilayah yang sama.

Setyanto (2003:11). mengatakan manfaat atau komponen e-government antara lain:

1. Lebih membina organisasi lokal
 - A. Memberikan garis organisasi "satu muka".
 - B. Membantu kerjasama bantuan.
 - C. Berikan informasi langsung.
 - D. standardisasi organisasi.
2. Membina lebih lanjut pelaksanaan administrasi
 - A. Kontrol yang kuat dibuat oleh masyarakat.
 - B. Mempercepat eksposur.
 - C. hasil terukur,

D. Koordinasi antar tempat kerja.

3. Kenaikan gaji

A. Menyambut sekutu moneter.

B. Tingkatkan pertemuan.

C. Meningkatkan dikirim.

4. Pendekatan Eksekusi E-government

Mengingat Pedoman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, perkembangan pemanfaatan informasi sebagian besar ditinjau dan beberapa perspektif, antara lain sebagai berikut:

1. E-Leadership; Sudut pandang ini terkait dengan kebutuhan dan dorongan negara dalam mengharapkan dan melibatkan kemajuan kemajuan informasi.
2. Pembentukan Asosiasi Informasi; Hal ini berkaitan dengan kondisi tahap korespondensi media dan akses, kualitas, pengembangan dan biaya pengelolaan akses.
3. Informasi kepala suku; Poin ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan informasi dewan, mulai dari pengorganisasian, pemeliharaan, pembatasan, hingga pengaturan dan pengangkutan.
4. Lingkungan Usaha; Perspektif ini terkait dengan keadaan keuangan, sistem perdagangan, dan aturan yang menyusun rencana untuk mengembangkan bisnis kemajuan informasi lebih lanjut, terutama yang memengaruhi kelancaran perkembangan informasi antara spesialis terbuka dan semua orang dan dunia bisnis, antara substansi bisnis, antara komponen bisnis dan individu. sebagai aturan, dan di seluruh jaringan.

5. Masyarakat dan SDM, perspektif ini terhubung dengan kecerdasan penyebaran kemajuan informasi dalam latihan di kabupaten, dua individu dan afiliasi, dan sejauh mana pengembangan informasi disebarkan ke daerah melalui siklus pembelajaran.

Mempertimbangkan keadaan yang berkelanjutan. Sesuai dengan Help Rules R I Nomor 3 Tahun 2003, untuk mencapai tujuan fundamental e-government, penting dilakukan 6 (enam) kerangka kerja yang terkait erat, yaitu:

1. Membudayakan sistem pertolongan yang handal dan terpercaya, serta terbuka untuk lingkungan yang lebih luas.
2. Mengkoordinasikan secara menyeluruh sistem dan pola kerja otoritas publik dan perangkat daerah otonom.
3. Memanfaatkan perkembangan informasi.
4. Memperluas minat dunia usaha dan mendukung kemajuan industri media transmisi dan informasi.
5. Membatasi SDM baik pada spesialis terbuka maupun pada pemerintahan daerah otonom, disertai dengan pengembangan e-kapabilitas provinsi.
6. Membawa kemajuan yang disengaja melalui tahapan yang membumi dan terukur.

Juga, dengan mempertimbangkan apa yang diungkapkan dalam Deklarasi Otoritas No. 3 Tahun 2003 tentang Rencana Permainan Publik dan Filsafat untuk Kemajuan, bahwa mengenai informasi perdagangan dan manajemen kebijakan yang diberikan oleh spesialis terbuka melalui asosiasi informasi, pelaksanaan e-government dapat dibantu keluar melalui 4 (empat) level sebagai berikut:

Level 1 - Rencana permainan yaitu, konsolidasi;

1. Yayasan informasi lingkungan di setiap asosiasi:
2. Pengaturan SDM;
3. Pengaturan akses kantor yang memadai, misalnya memberikan tempat kerja multi-alasan, tempat umum, Web Bistro, SMS-Concentration, dll.;

Level 2 - Kemajuan yang bergabung:

1. Penciptaan lingkungan informasi publik cerdas;
2. Membuat poin-poin asosiasi yang berhubungan dengan berbagai instansi;

Level 3 - Asosiasi yang menggabungkan:

3. Penciptaan lingkungan perdagangan berkat publik;
4. Membuat interoperabilitas aplikasi dan data dengan berbagai asosiasi.

Level 4 - Gunakan yang menggabungkan:

1. Penggunaan yang dikembangkan lebih lanjut untuk organisasi O2G. Terdiri G2B dan G2C.

Tolak Indrajit (2005:8). Ada berbagai faktor penentu yang harus dilihat dalam menentukan tingkat kesiapan suatu kabupaten untuk melaksanakan e-government, khususnya:

1. Sistem korespondensi media, pada tingkat pelaksanaan, perangkat keras seperti komputer, asosiasi dan instansi akan menjadi pemikiran vital dalam pelaksanaan e-governnment.
2. Tingkat Administrasi Sistem dan Penggunaan TI oleh Organisasi Terbuka, dengan mempertimbangkan sejauh mana pemerintah yang sedang

berlangsung telah melibatkan berbagai kemajuan informasi untuk membantu pelaksanaannya sehari-hari, akan terlihat tingkat kesiapannya. melaksanakan pemikiran e-government.

3. Aksesibilitas SDM di pemerintahan, yang akan menjadi "pemain utama" atau subjek dalam menggerakkan e-government pada dasarnya adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah, sehingga tingkat kapasitas dan bakat mereka akan sangat mempengaruhi pengenalan pelaksanaan e-government.
4. Rencana Keterbukaan dan Penggunaan Sumber Daya, dapat dipastikan bahwa terlepas dari seberapa kecil dorongan e-government, berbagai sumber keuangan diharapkan untuk mendukungnya.
5. Lawful Design, mengingat kemungkinan e-government terkait dengan upaya membuat dan mengalirkan informasi mulai dari satu pihak kemudian baik ke pihak berikutnya. Masalah keamanan data/informasi dan penghargaan pengembangan yang berwenang, misalnya, akan menjadi hal yang harus dilindungi oleh peraturan atau pedoman yang berlaku.
6. Perubahan Perspektif, pada dasarnya pemanfaatan e-government merupakan proyek perubahan kepanitiaan yang membutuhkan kerinduan untuk mengubah model dan cara pandang yang terbaik.

Luas standar dampak pelaksanaan e-government di Indrajit (2005:24). termasuk:

1. Tingkat klien yang menggunakan e-government kontras dengan aktivitas manual sebelumnya;
2. Jumlah "kunjungan" atau login yang dapat diandalkan ke aplikasi e-government melalui Internet:

3. Berapa biaya yang ditimbulkan baik antara organisasi pemerintah maupun yang harus ditanggung oleh keseluruhan penduduk atau spesialis/klien/klien organisasi yang diberikan oleh spesialis publik;
4. Memperluas cakupan produk atau organisasi baru yang diakui oleh spesialis terbuka ke area tersebut;
5. Kenyamanan dalam "mengonsumsi" asosiasi dukungan warga sesuai lingkungan; dll.

Dalam Indrajit (2005:107). Eksekusi e-government tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya tanpa mengubah strategi dewan dalam menangani sumber daya dan aset negara lainnya. Untuk mencapai semua ini, perubahan dewan memerlukan beberapa kemajuan signifikan yang harus dilakukan untuk membantu pelaksanaan e-government. Dia:

1. Business Cycle Reengineering, secara khusus mengarahkan review menyeluruh terhadap proses kerja yang berjalan. Perubahan benar-benar muncul di lingkungan, selain dari keseluruhan proses kerja yang harus diperiksa secara konsisten.
2. Staf dan delegasi membutuhkan cara terbaik untuk menangani pekerjaan, yang memungkinkan peningkatan "lingkungan kerja virtual" di antara mereka. Virtual office adalah suatu kondisi dimana setiap staf dapat melakukan segala sesuatu dari manapun mereka berada tanpa harus pergi ke tempat kerja secara handal. Perintis berharap untuk mengubah cara pengaturan mereka untuk membuat eksekusi dan menghasilkan premis penilaian seseorang, dan saat ini bukan kerja sama.

3. Tempat kerja yang mengizinkan staf dan agen untuk bekerja dari rumah dan bekerja dari jarak jauh. Menggunakan pengembangan dan kantor web, anggota staf dapat menyelesaikan sebagian besar proses bisnis lokal tanpa perlu datang ke kantor.
4. Untuk mencapai hal ini, jelaslah bahwa kemampuan dan data yang memadai diperlukan untuk semua. Pengajaran dan pengaturan adalah metode terbaik untuk menyiapkan agen untuk bekerja ketika e-government dilaksanakan.

Selain itu, menurut Indrajit (2005: 18) ada sekitar 6 (enam) bagian penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan e-government. mandiri adalah:

1. Pengembangan Konten, dalam hal kemajuan aplikasi (pemrograman), jaminan aturan eksplisit, penggunaan bahasa pemrograman, seluk-beluk sistem basis data. Pengaturan UI, dan sebagainya.
2. Expertise Building, tentang pengadaan SDM, kesiapan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan seluruh jajaran SDM di berbagai lini pemerintahan.
3. Jaringan, berkenaan dengan keterbukaan struktur persuratan dan kemajuan informasi dimana e-government dilaksanakan.
4. Pedoman terkomputerisasi. tentang keberadaan keseluruhan rangkaian undang-undang dan rencana yang telah disusun terkait dengan seluk-beluk pelaksanaan e-government yang beraneka segi.
5. Fokus Kolaborasi Penduduk. tentang pengadaan SDM dan peningkatan saluran multi-akses yang dapat digunakan oleh semua wilayah terdekat dan kaki tangan e-government di mana saja dan kapan saja mereka membutuhkan.

6. Modal, gambaran modal untuk proyek e-government yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan biaya setelah bisnis selesai, misalnya untuk keperluan pemeliharaan dan peningkatan, di sini Liin perlu mempertimbangkan model pembayaran seperti apa. layak untuk digunakan dalam pemerintahan.

Sementara itu, menurut United State dalam Budiati (2004:21), disebutkan bahwa ada 7 (tujuh) faktor kunci dalam penyelenggaraan e-government. Dia:

1. Konstruksi yang sah. terkait dengan hal-hal halal dan ada aturan yang memberikan aturan dan mendukung pemanfaatan e-government.
2. Infrastruktur. bergabung dengan tempat kerja dan sistem yang membantu pemanfaatan e-government.
3. Kekuatan SDM, terkait dengan rencana SDM dalam mendukung penyelenggaraan e-government.
4. Koordinasi, mengaitkan dengan koordinasi yang ada dalam mendukung penyelenggaraan e-government.
5. Kepastian, salah satu prinsip utama karena mengingat kepercayaan masyarakat atas data dan informasi yang diberikannya. Adanya keamanan yang terjaga akan memberikan kepastian bahwa segala sesuatunya baik untuk wilayah lokal dalam kesehariannya dalam mendapatkan layanan online sambil memastikan kerjasama lebih nyata dari mereka.
6. Keamanan. titik keamanan dikaitkan dengan bagaimana catatan, arsip. Selain itu, berbagai informasi harus diperoleh oleh individu yang berhak. Bagian dari keamanan data sangat ditentukan dalam kemajuan e-government, karena

jika informasi atau data tersebut disalahgunakan maka akan membawa perubahan negatif yang tidak diinginkan.

7. Bantuan bersama, terkait dengan organisasi yang diberikan oleh pakar terbuka kepada daerah yang memanfaatkan e-government.

Sesuai Mangkunegara (2004: 67) dalam bukunya Human Resource The Board Association, dikemukakan kemungkinan eksekusi sebagai berikut:

Eksekusi adalah konsekuensi dari pekerjaan secara kualitas dan jumlah yang dilakukan oleh seorang delegasi dalam melakukan komitmennya sesuai dengan komitmen yang diberikan.

Smith (1982:393) dalam Sedarmayanti (2001:50). menyatakan bahwa pertunjukan adalah “hasil penggerak dari siklus, manusia dan sebagainya”, maka dikatakan pertunjukan adalah hasil atau akibat dari suatu pergaulan. Eksekusi memiliki hubungan yang erat dengan masalah efektivitas karena merupakan penanda dalam menyimpulkan bagaimana upaya dilakukan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dalam suatu organisasi.

Sesuai Mahsun (2006:25) dalam bukunya Eksekusi Penilaian Wilayah Publik, menjelaskan eksekusi sebagai berikut:

Eksekusi adalah penggambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program pengembangan/teknik dalam mengenali tujuan, sasaran, misi dan impian progresif yang tertuang dalam fundamental game plan suatu afiliasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2001: 34) mengemukakan “pelaksanaan (pencapaian kerja) adalah suatu hasil kerja yang diselesaikan

seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan memikirkan kemampuan, pengalaman dan kejujuran serta waktu”.

Sedangkan Armstrong dan Honorable (1998:15) dalam Fianka {2008) mengatakan bahwa presentasi atau pelaksanaan pekerjaan dimulai dari kemungkinan pelaksanaan. Eksekusi berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Eksekusi adalah tentang selesai dan bagaimana menjalankannya. Eksekusi adalah hasil pekerjaan yang memiliki wilayah kekuatan yang signifikan untuk tujuan utama afiliasi, ketergantungan klien, dan melakukan tanggung jawab keuangan.

Sementara itu, pemikiran agen eksekusi menurut Bamhang Kusriyanto dikutip oleh Harbani Pasolong (2007: 175) dalam bukunya *Strategy The Executives Speculation* adalah “Eksekusi buruh merupakan hasil kerja individu dalam suatu afiliasi”.

Mencermati pengertian eksekusi dan sebagian dari definisi di atas, maka cenderung terlihat bahwa eksekusi penggambaran sangat erat kaitannya dengan konsekuensi pekerjaan seseorang dalam suatu perkumpulan, konsekuensi dari pekerjaan ini dapat berupa kualitas, jumlah, dan kesamaan. nalar. Eksekusi agen tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas dan keterampilan di tempat kerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh jiwa kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertunjukan delegasi adalah kewajiban atau hasil kerja keras para agen untuk mencapai tujuan yang progresif. di mana dia harus ditempatkan dalam pengertian

dengan dominasinya.

Penilaian eksekusi merupakan perkembangan yang sangat penting karena pada umumnya akan digunakan sebagai suatu perluasan konsekuensi dari suatu hubungan dalam mencapai tujuan utamanya. Menurut Robertson (2002) dalam Mahsun (2006:25) menggambarkan pelaksanaan yang dinilai sebagai berikut:

Menilai eksekusi adalah proses menilai kemajuan pembunahan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, diberikan informasi untuk penggunaan sumber daya yang mampu dalam membuat pekerjaan dan item: ide pekerjaan dan item (seberapa baik pekerjaan dan item disampaikan kepada klien dan berapa banyak klien puas); hasil dari kegiatan membedakan dan berpikir optimal; demikian juga, koherensi latihan dalam mencapai tujuan.

Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun (2006:25). Assessment of execution merupakan pengembangan untuk mensurvei pencapaian target eksplisit yang didapat dari tujuan dasar afiliasi. Setiap afiliasi biasanya tertarik dengan pengukur kinerja berdasarkan beberapa sudut pandang, termasuk:

1. Poin terkait uang

Ini termasuk rencana keuangan hierarkis, karena pada dasarnya akan sama dengan perkembangan darah dalam tubuh manusia, dan ini adalah sudut pandang penting untuk dipertimbangkan dalam menilai kinerja.

2. Dedikasi pembelanja

Dalam globalisasi perdagangan, pekerjaan dan posisi klien sangat penting dalam menentukan metode progresif. Semakin banyak minat individu dalam

bantuan berkualitas, semakin banyak afiliasi yang seharusnya menawarkan bantuan terbaik yang andal.

3. Dalam Usaha Bisnis

Informasi bisnis orang dalam diharapkan untuk memastikan bahwa semua aktivitas progresif disesuaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran hierarkis yang disimpan dalam aktivitas yang luar biasa.

4. Kepuasan Buruh

Buruh adalah aset yang harus diperiksa dengan tepat. terutama di perusahaan yang melakukan banyak perbaikan, pekerjaan utama para pekerja adalah nyata. Dengan asumsi bahwa agen diatur dengan tepat. kemudian, pada saat itu, penghapusan asosiasi sulit untuk dicegah.

5. Kepuasan kelas sosial kaki tangan

Kegiatan asosiasi administrasi terkait dengan berbagai pertemuan yang mengkhawatirkan faktor-faktor nyata mereka. Oleh karena itu, informasi dari pengukur eksekusi diharapkan dapat mengatasi masalah kaki tangan.

6. Waktu

Ukuran waktu merupakan variabel yang harus diperhatikan seperti dalam rencana pelaksanaan yang dinilai. Kadang-kadang, kami berpendapat bahwa informasi tersebut harus dipotong begitu saja. meskipun demikian, informasi tersebut ditangguhkan dalam memperoleh, kadang-kadang tidak relevan / lama.

Bidang aturan pelaksanaan seperti yang ditunjukkan oleh Mangkunegara (2005: 18) terdiri dari perspektif kuantitatif dan sudut pandang emosional.

1. Poin kuantitatif meliputi:

- A. Siklus kerja dan keadaan kerja.
- B. Waktu yang diinvestasikan atau panjang energi untuk menyelesaikan pekerjaan,
- C. Banyaknya kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan,
- D. Jumlah dan macam rencana manajerial di lingkungan kerja.

2. Perspektif emosional menggabungkan:

- A. Pengaturan bisnis dan sifat pekerjaan.
- B. Tingkat kemampuan dalam bekerja.
- C. Kemampuan menggali data atau informasi, keterbatasan atau kegagalan penggunaan peralatan mesin, dan
- D. Kemampuan untuk mengevaluasi (protes menggerutu pembeli).

Penilaian eksekusi yang tepat harus dapat dibayangkan dengan:

1. Jaminan bahwa persyaratan yang diinginkan oleh klien telah terpenuhi:
2. Lukai standar pelaksanaan untuk melakukan review;
3. Achitungan individu untuk menyalurkan tingkat eksekusi:
4. Pahami pentingnya masalah nilai dan cari tahu persyaratan apa yang harus dipertimbangkan;

5. Hindari hasil berkualitas buruk:
6. Merenungkan penggunaan sumber daya;
7. Carilah analisis untuk membantu upaya perbaikan.

Menurut Kreitener dan Kinieki (2001:302) dalam Wibowo (2008:320) ada persyaratan dalam menilai eksekusi, antara lain:

1. Dalam hal melihat cara berperilaku dan latihan yang sangat berarti bagi individu:
2. Memiliki pilihan untuk menentukan sudut atau penggambaran eksekusi:
3. Memiliki pemahaman tentang penyetulan tangga nada dan instrumen;
4. Harus diaduk untuk menyelesaikan pekerjaan pemosisian dengan sengaja.

Penilaian kinerja buruh dikemukakan oleh Bernadin dan Russel (1993: 135) yang disinggung oleh Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya Human Resource Board adalah sebagai berikut:

1. Ukuran pekerjaan: berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya.
2. Sifat pekerjaan: sifat pekerjaan yang diselesaikan berdasarkan kepatutan dan status.
3. Work Data: keluasan data tentang pekerjaan dan kapasitas.
4. Kreativitas: keinovatifan dari pemikiran-pemikiran yang muncul dan latihan untuk mengelola isu-isu yang muncul.

5. Kerjasama: persiapan untuk membantu orang lain atau orang-orang dari afiliasi.
6. Ketergantungan: perhatian mengenai komitmen terhadap dukungan dan hasil kerja.
7. Inisiatif: energi untuk merangkul pengejaran baru dan dalam menumbuhkan komitmennya,
8. Kapasitas individu: untuk, organisasi, kenyamanan dan keyakinan individu.

Sementara itu, Dharma dalam bukunya *The Load up Administration* (2003: 355), mengatakan “hampir semua cara untuk menangani penilaian pelaksanaan pertimbangkan hal-hal berikut:

1. Sum, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau diselesaikan. Penilaian kuantitatif menggabungkan memilah hasil siklus atau pelaksanaan latihan. Ini terkait dengan seberapa banyak hasil yang disampaikan.
2. Mutu, khususnya mutu yang harus dibuat (apakah). Tingkat abstrak hasil mencerminkan tingkat "tingkat kepuasan", misalnya instruksi untuk mengurus bisnis dengan baik. Hal ini terkait dengan struktur hasil.
3. Akal sehat, terutama apakah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penilaian idealitas adalah jenis penilaian kuantitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memutuskan akal sehat untuk menyelesaikan suatu gerakan.

Menurut Mangkunegara (2005:16-17), penentu pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan orang dalam afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Elemen individu

Secara intelektual, individu yang normal adalah individu yang memiliki derajat kesejatian yang tinggi antara kemampuan mental (gaib) dan kemampuan fisik (jasmani). Dengan tingkat loyalitas yang tinggi di antara kapasitas mental dan asli, individu memiliki pusat diri yang luar biasa. Obsesi yang baik adalah modal utama manusia untuk dapat mengelola dan memanfaatkan harapannya dengan tepat dalam menyelesaikan pelatihan sehari-hari atau praktik kerja dalam mencapai tujuan yang sah.

2. Faktor normal progresif

Faktor lingkungan kerja yang progresif sangat kuat bagi individu dalam menjalankan bisnis. Unsur-unsur dari jenis progresif adalah sindiran untuk mengkonsolidasikan pengaturan asumsi yang jelas, memenuhi kekuatan, menguji target posisi, rencana korespondensi kerja yang berhasil, asosiasi kerja yang diatur dengan baik, tempat kerja yang sadar dan dinamis, membuka pintu panggilan dan umumnya kantor kerja yang memadai.

Dari evaluasi di atas secara umum akan terlihat bahwa satu variabel dan komponen reguler yang sah mempengaruhi kinerja pekerja. Dalam Mahmudi (2005:21). Eksekusi sebenarnya adalah bentuk berlapis-lapis yang mengkonsolidasikan banyak faktor yang mempengaruhi. Komponen yang memengaruhi pertunjukan adalah:

1. Faktor individu/individu, meliputi: data, kapasitas, limit, keberanian, motivasi dan kewajiban yang didorong oleh setiap individu.

2. Variabel daya prakarsa, meliputi: gagasan memberi pelipur lara, jiwa memberi arahan, dan bantuan yang diberikan oleh pengarah dan pelopor perkumpulan S.
3. Faktor kelompok, meliputi: gagasan bantuan dan euforia yang diberikan oleh kaki tangan dalam pertemuan itu, kepercayaan pada jalur individu. kerjasama dan kekompakan.
4. Setting (keadaan) faktor yang diatur. meliputi: strain luar dan dalam dan perubahan alam.

3. Pedoman Pelaksanaan

Apalagi dengan pedoman tenaga pelaksana seperti yang dikatakan Fayol dalam Sugiyono (2008: 105). termasuk:

1. Kualitas

Salah satu indikasi penurunan kinerja delegasi adalah menunjukkan efektivitas dan sifat kerja, produktivitas kerja yang rendah ini dapat dinilai atau menonjol dari masa lalu. Hal ini terjadi karena kelambanan, penantian, dll. Sifat agen pekerjaan menyiratkan produktivitas kerja karena buruh pemula tidak akan menciptakan pekerjaan yang berkualitas.

2, Jumlah (jumlah)

Kualitas merupakan indikasi peningkatan status pekerjaan sehingga dicapai jika ada kapasitas sumber daya manusia, baik yang sesuai maupun diimbangi dengan kapasitas di bidangnya masing-masing. Jumlah tersebut dapat

dinilai dengan kemampuan mengolah SDM secara total dan adil.

3. Upaya terkoordinasi (kelompok kerja)

Dalam upaya terkoordinasi, seringkali terdapat perbedaan waktu dalam pengambilan keputusan atau pertimbangan sehingga tidak mungkin ada kerja sama yang tepat antara atasan dan bawahan. Karena itu. Dalam suatu hubungan sering kali ada perbedaan dalam penilaian, jadi di dalam suatu afiliasi Anda perlu memikirkan tentang apa yang akan terjadi di lingkungan kepegawaian.

4. Kemajuan (kemajuan)

Tanda lain yang menunjukkan penurunan kinerja pekerja adalah ketika ada organisasi yang tidak menyenangkan di lingkungan kepegawaian. Oleh karena itu, pengaturan untuk menyelesaikan kemajuan membutuhkan bantuan dari statusnya saat ini, sehingga perbaikan tersebut juga dapat mendorong pameran buruh.

5. Kemandirian (kesempatan)

Peluang adalah tercapainya kepuasan pelaksanaan di lingkungan lingkungan tempat kerja, sehingga tercapainya target (sasaran) yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai secara nyata.

Menurut Dwiyanto (1995) dalam bukunya yang berjudul Perubahan Administratif Publik di Indonesia (2002:48), ada beberapa penanda yang biasa digunakan untuk mengukur eksekusi, antara lain:

1. Produktivitas

Gagasan kemahiran menilai tingkat efisiensi serta ketercapaian peraturan. Efektivitas sebagian besar dianggap sebagai sejauh mana antara data dan hasil.

2. Gagasan organisasi

Masalah kualitas resmi mungkin menjadi semakin besar dalam mengartikan acara afiliasi publik. Sisi positif dari memasukkan lingkungan sebagai panduan pertunjukan adalah bahwa informasi lingkungan sering kali dapat diperoleh dengan cara yang sukses dan mendasar

3. Daya tanggap

Daya tanggap adalah batas hubungan untuk memahami kebutuhan lingkungan, mengembangkan rencana, dan fokus pada organisasi terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan setempat.

4. Risiko

Sesuai Lenvine (1990) dalam Dwiyanto (2002:49). Komitmen itu masuk akal apakah memimpin pelaksanaan afiliasi publik dilakukan sesuai norma hierarkis asli atau sesuai metodologi definitif, baik tersurat maupun disimpulkan.

5. Kewajiban

Kewajiban publik menyindir seberapa banyak teknik dan arahan afiliasi publik bergantung pada spesialis politik yang dipilih oleh orang-orang.

Sedangkan petunjuk pelaksanaannya seperti yang ditunjukkan oleh Dharma (2003:355), khususnya:

A. Jumlah pekerjaan (jabatan absolut), terutama jumlah h saat ini diselesaikan atau diselesaikan. Penggabungan penilaian kuantitatif rates memilah hasil siklus atau pelaksanaan latihan. Ini berhubungan dengan jumlah hasil yang dihasilkan.

B. Gagasan pekerjaan, terutama kualitas yang harus diselesaikan (apakah). Penilaian mutu adalah dengan melihat tingkat ketelitian pejabat dalam melaksanakan tugas, tingkat kerapian pekerjaan, dan kepekaan menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan.

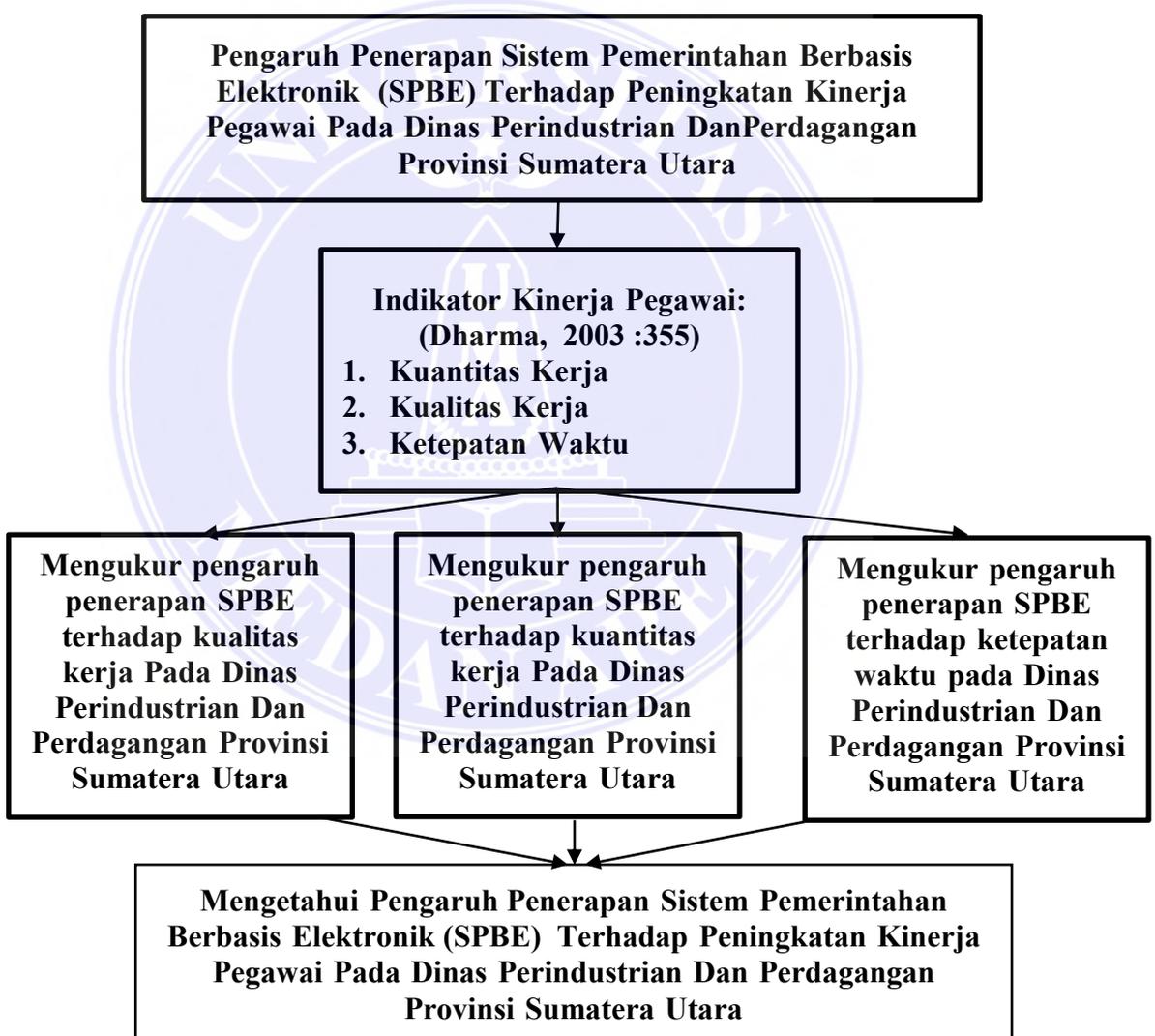
C. Akal sehat (idealitas), lebih tegas lagi apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penilaian idealitas adalah semacam penilaian kuantitatif yang luar biasa yang menentukan akal sehat dalam melakukan kepuasan.

Berdasarkan penilaian ahli-ahli yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa penanda layar adalah titik-titik atau bagian-bagian yang digunakan untuk melihat tercapainya suatu pekerjaan yang akan dicapai dengan maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Rancangan Pemikiran

Struktur keyakinan merupakan campuran dari spekulasi yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan agar secara praktis dapat memahami unsur-unsur yang dimaksud, menunjukkan hubungan antara variabel yang dipertimbangkan dan dapat memahami sifat faktor dalam populasi yang berbeda (Sugiyono, 2014:

477). Susunan pemikiran dalam penelitian ini mengartikan bahwa pelaksanaan kEstaff merupakan hasil yang dilakukan oleh delegasi dalam menyelesaikan komitmennya sesuai dengan komitmen yang telah diberikan pada waktu tertentu. Pelaksanaan sistem yang dilakukan oleh para ahli terbuka tidak terlepas dari pengaruh para buruh pelaksana dalam afiliasinya, termasuk penolakan penggambaran dalam diri para ahli publik itu sendiri.



2.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penilaian kuantitatif adalah reaksi terhadap masalah pertanyaan eksplorasi sehubungan dengan spekulasi yang harus dicoba melalui cara yang paling terkenal untuk memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data.

Mempertimbangkan penggambaran ini, hipotesis yang berlaku dapat diatur dalam survei ini:

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kuantitas jabatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sumatera Utara.

Ha : Terdapat pengaruh mendasar dari pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kuantitas jabatan di Cabang Modern dan Perdagangan Daerah Sumatera Utara.

2. Ho : Tidak ada pengaruh yang sangat besar dari Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap gagasan kerja di Kawasan Bisnis dan Perdagangan Wilayah Sumatera Utara.

Ha : Terdapat efek dasar dari Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap gagasan kerja di Kawasan Bisnis dan Perdagangan Sumut.

3. Ho : Tidak ada pengaruh yang sangat besar dari Implementasi Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap visi Bisnis dan Perdagangan Wilayah Sumatera Utara.

Ha: Ada pengaruh yang luar biasa besar dari Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap optimisme di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sumut.

4. Ho : Tidak ada efek yang dikecualikan dari pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pelaksanaan pekerjaan di Cabang Modern dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Ha : Ada efek dasar dari Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pengenalan tenaga kerja di Cabang Modern dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Model untuk uji eksplorasi ini adalah sebagai berikut:

Ho dianggap dan Ha ditolak dengan anggapan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau sebaliknya jika nilai likelihood $> \alpha 0,05$. Ho ditolak dan Ha dianggap jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sebaliknya dengan dugaan nilai probabilitas $< \alpha 0,05$.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penilaian harus diselesaikan secara definitif dan tepat seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip cerdas sehingga ahli dapat dianggap bijaksana. Hal ini akan terlihat jika didukung oleh instrumen yang tepat untuk melihat suatu isu. Gadget adalah prosedur eksplorasi. Metode eksplorasi adalah kerangka kerja atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan penilaian yang jelas, dan untuk mencapai tujuan ini harus didukung oleh sistem yang melibatkan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, yang dikenal sebagai prosedur, sehingga penyelidikan sampai pada tingkat tertentu. . kualitas dan keaslian yang teguh (Sulistyo-Basuki, 2006: 92).

Penelitian ini menggunakan sistem kuantitatif, mengingat dalam penelitian ini hubungan antar faktor bersifat kausal dan sekaligus melihat hipotesis antar faktor dalam kapasitas untuk mengeksekusinya. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:11) strategi kuantitatif adalah suatu metode untuk memelihara data peristiwa sosial dengan menggunakan instrumen penelitian, pengecekan data bersifat kuantitatif/kuantifikasi yang diharapkan dapat menguji hipotesis yang telah disusun dan hubungan antar variabel penyebab. hal-hal yang dipertimbangkan.

Meskipun jenis eksplorasi yang digunakan dikaitkan dengan jenis uji yang benar-benar koheren. Eksplorasi edukatif semacam ini menurut Sugiyono (2014:6) adalah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu titik tertentu, dengan memasukkan penilaian sentimen publik sebagai data yang signifikan.

3.2. Definisi Terapan dan Definisi Praktis

Faktor eksplorasi seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:38) adalah

sifat-sifat orang atau benda yang memiliki keragaman mulai dari satu individu kemudian ke individu berikutnya atau satu hal ke hal lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bergerak. Ada 2 variabel yang digunakan dalam audit ini, yaitu:

1. Subordinate Variable, tepatnya: Eksekusi SPBE (Y)
2. Variabel bebas/independen, khususnya: Eksekusi Agen (X)

3.2.1. Definisi Hipotetis

Definisi yang dapat dibayangkan adalah penjelasan tentang pentingnya suatu pemikiran, terutama menyampaikan hipotesis yang dibentuk melalui teori dari kesan keunikan. Melalui pemikiran ini dapat diterima bahwa ia dapat menambah teori dengan memasukkan satu istilah untuk beberapa peristiwa terkait.

Definisi yang ditentukan dalam survei ini, khususnya:

A. E-government (D) adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (peningkatan informasi dan persuratan) untuk lebih menunjang administrasi sesuai wilayah setempat, organisasi bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju organisasi yang besar. (Penjelasan Resmi No. 3 Tahun 2003 tentang Kerangka dan Cara Umum Menghadapi E-Government)

B. Eksekusi (X) adalah hasil survei yang dilakukan oleh seorang delegasi, baik kualitas maupun jumlah yang dicapai oleh seorang buruh dalam menyelesaikan komitmennya sesuai dengan komitmen yang diberikan kepadanya (Mangkunegara (2007: 65). variabel pertunjukan, penelitian ini melibatkan sudut pandang penyajian sebagai (Dharma, 2003: 355), sebagai berikut:

1. Kuantitas jabatan (X1) adalah volume/ukuran pekerjaan. Kemampuan agen untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan volume/penjumlahan untuk diselesaikan atau diselesaikan.
2. Gagasan karya (X2), kualitas tertentu (apakah). Kemampuan agen untuk mengurus bisnis mengingat keuntungan dari pekerjaan yang diselesaikan.
3. Akal sehat (X3), yaitu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Batas delegasi untuk menyelesaikan pekerjaan diberikan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3.2.2. Definisi yang Berguna

Sebagaimana dikemukakan oleh Nazir (2005: 34), definisi yang berguna adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau bekerja dengan memberi arti, menunjukkan mempersiapkan, atau memberikan suatu tindakan yang seharusnya mengukur pergantian peristiwa atau variabel. Definisi yang berguna dalam penelitian ini harus ditemukan dalam tabel di bawah ini

Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Dimensi	Definisi Operasional	No	Indikator
Kinerja (X)	Kuantitas kerja	Kuantitas kerja adalah kemampuan kerja pegawai menyelesaikan pekerjaan berdasarkan volume atau jumlah pekerjaan.	1	Menyelesaikan tugas sesuai target
			2	Mampu mencapai hasil kerja diatas standard
			3	Membandingkan hasil pekerjaan dengan program kerja
	Kualitas Kerja	Kualitas kerja adalah Kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan berdasarkan mutu atau baik buruknya pekerjaan.	1	Memeriksa kembali hasil pekerjaan
			2	Mengerjakan pekerjaan dengan perhitungan
			3	Tidak banyak melakukan kesalahan dalam bekerja
			4	Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
	Ketepatan Waktu	Ketepatan waktu adalah kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu yang ditentukan.	1	Mampu menyelesaikan tugas sesuai prosedur.
			2	Mampu menyelesaikan tugas dengan Cepat
			3	Mampu mengalokasi waktu kerja

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah spekulatif yang terdiri dari: objek/subjek yang memiliki kualitas yang masih mengudara bagi peneliti untuk membidik dan kemudian menyelesaikannya (Sugiyono, 2014: 297). Populasi dalam penelitian ini adalah buruh pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sumatera Utara sebanyak 138 responden.

3.3.2. Tes

Model sangat penting untuk jumlah dan kualitas yang digerakkan oleh daerah setempat (Sugiyono, 2014). Pengujian jumlah dalam audit ini dilakukan dengan pendekatan Slovin, dengan kondisi yang sesuai:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian = 10 persen)

Berdasarkan rumus Slovin di atas nilai kritis yang digunakan adalah 10 persen, jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 138, maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$x = \frac{138}{1 + 138(0,1)^2}$$

$$X = 57,98319328$$

$$X = 58$$

Hasil estimasi contoh menunjukkan nilai 58, dan disimpulkan bahwa 58 responden diambil sebagai contoh. Teknik penilaian yang digunakan adalah Nonprobability Trying, yaitu suatu strategi penilaian yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap bagian atau individu dari populasi terpilih untuk diperiksa. Memanfaatkan teknik Incident Assessment. Dengan cara ini strategi pengujian tunduk pada risiko, yaitu, siapa pun yang secara tidak sengaja atau tiba-tiba bertemu dengan seorang ahli dapat digunakan misalnya, dengan harapan bahwa seseorang yang dialami secara kebetulan dipandang sebagai titik fokus data hingga 58 responden.

3.3.3. Jenis dan Mata Air Data

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai sifat-sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Sugiyono, 2014: 34). Data yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah data fundamental dan data diskresioner.

1. Data Signifikan

Data fundamental adalah data yang dikumpulkan oleh para ahli secara langsung dari responden di lapangan. Dalam survey ini diperoleh data yang signifikan melalui survey mengenai faktor-faktor investigasi yang diselesaikan oleh para buruh di Cabang Perdagangan Modern dan Teritorial Sumut.

2. Data Ekstra

Data diskresioner adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melalui orang lain atau laporan. Data diskresi dalam penelitian ini digunakan untuk membantu data yang signifikan dengan memahami masalah yang akan dipertimbangkan. Data diskresioner yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perdagangan Sumatera Utara, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal-jurnal yang sah, informasi cerita lain yang diambil melalui sistem on-line (web), dan catatan yang berhubungan dengan bahan diskusi. . dari proposisi ini.

3.3.4. Metodologi Penyusunan Data

Metode penyusunan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan

Merupakan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan sinopsis pernyataan/pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk salinan tercetak kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan sebagai data atau informasi yang berhubungan dengan faktor penelaahan, khususnya e-government dan eksekusi. Survei diberikan kepada buruh di Tempat Kerja Sistem Tangamus Terkait Uang dan Papan Aset. Dalam penelitian ini skala penilaian yang digunakan adalah skala Likert. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 132) skala Likert digunakan untuk menilai sudut pandang, keputusan, dan cara pandang seseorang atau kelompok tentang keistimewaan bersikap ramah. Penelitian ini menggunakan skala likert stretch sort, yaitu skala yang menunjukkan kesebandingan nilai skala dalam kualitas yang dinilai.

Responden diminta untuk menyelesaikan pertanyaan pada skala bentangan verbal di sejumlah kelas tertentu. Dengan menggunakan skala Likert, variabel-variabel yang akan dinilai diubah menjadi perspektif, sudut pandang diubah menjadi penanda-penanda terukur yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat hal-hal instrumen sebagai pertanyaan atau penjelasan yang harus dijawab oleh responden. Setiap jawaban terhubung dengan struktur permintaan atau dukungan disposisional yang disampaikan dengan kata-kata.

Tabel 2. Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1.	Tidak Baik	1
2.	Kurang Baik	2
3.	Baik	3
4.	Sangat Baik	4

Kemudian untuk menentukan pengklasifikasian tanggapan responden terhadap setiap pilihan apakah yang bernama luar biasa tinggi, tinggi, sedang dan rendah, cenderung tidak seluruhnya diselesaikan dengan cara penyertaan.:

Skor Tertinggi – Skor Terendah
Banyak Bilangan

$$\text{Maka Memperoleh} = \frac{4-1}{4} = 0,75$$

Tabel 3. Skala Likert Hasil Klasifikasi

No	Jawaban	Skor
1.	Tidak Baik	1,00-1,75
2.	Kurang Baik	1,76-2,50
3.	Baik	2,51-3,25
4.	Sangat Baik	3,26-4,00

3.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh karena strategi pengumpulan data, maka cara yang dapat dilakukan dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

1. Pilihan data (perubahan)

Langkah ini sangat penting untuk memilih data spesialis dan dapat digunakan untuk perawatan ekstra. Penentuan data ini dilakukan dengan benar-benar melihat reaksi dari hasil penilaian sentimen publik yang telah diselesaikan oleh para responden;

2. Pemilahan data (coding)

Langkah ini dilakukan untuk mengelompokkan reaksi responden ke dalam kelas. Pengumpulan ini diperlukan sebagai justifikasi penilaian kuantitatif, sehingga setiap reaksi responden diberi skor/hibah;

3. Pengelompokan data

Langkah ini bertujuan untuk menentukan keterulangan setiap reaksi responden dengan mengumpulkan reaksi responden yang diberi bobot kualitas sebagai sekumpulan tabel;

3.5. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Keaslian

Dalam penelitian, kecukupan instrumen tes (signifikan dan andal) sangat penting dalam pemilihan data. Karena data yang tepat menentukan ide hasil

penilaian (Riduwan dan Sunarto, 2013: 347).

Otentisitas merupakan kegiatan yang menunjukkan tingkat otentisitas atau keaslian suatu instrumen (Riduwan dan Sunarto, 2013: 348). Suatu instrumen dianggap penting jika dapat mengukur apa yang diinginkan. Keaslian masih mengudara dengan menggunakan kondisi Pearson Thing Second Coefficient Of Relationship. Resep Pearson Thing Second Coefficient Of Association adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n(\sum X_i^2) - (\sum X_i)^2][n(\sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2]}}$$

Sumber: Sugiyono, 2012: 356

- r_{xy} = koefisien Validitas
 X_i = Skor Nilai X
 Y_i = Skor Nilai Y
 N = banyaknya sampel yang dianalisa.

Uji Legitimasi diperkirakan melalui aturan yang menyertainya:

- Dalam hal nilai r hitung > r tabel, cenderung dianggap besar, dalam hal apapun dikatakan tidak valid.

- Likelihood (sig) < 0,05 maka instrumen dapat dikatakan substansial, dalam hal apapun dikatakan tidak valid.

Untuk menguji keabsahan instrumen pemeriksaan, spesialis mencoba keabsahan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan oleh 58 responden dengan r dasar (tingkat kepentingan) sebesar 0,329. Nilai 0,329 diperoleh dari

tabel asisten harga Pearson Second r. dalam menentukan nilai r dengan asumsi biaya koneksi $\leq 0,329$ dapat dianggap bahwa pernyataan tersebut tidak sah. Mengingat hasil estimasi dengan bantuan SPSS 16, maka dapat diketahui hubungan 17 pertanyaan mengenai kualitas support dengan skor all out sebagai berikut.:

Tabel 4. Tabel asisten harga Pearson Second r

Variabel	Nomor	R Hitung	R Tabel	Keputusan
Kuantitas Kerja	1	0,617	0,329	Valid
	2	0,660	0,329	Valid
	3	0,462	0,329	Valid
	4	0,449	0,329	Valid
	5	0,434	0,329	Valid
	6	0,579	0,329	Valid
Kualitas Kerja	7	0,589	0,329	Valid
	8	0,465	0,329	Valid
	9	0,428	0,329	Valid
	10	0,435	0,329	Valid
	11	0,387	0,329	Valid
	12	0,532	0,329	Valid
Ketepatan Waktu	13	0,656	0,329	Valid
	14	0,715	0,329	Valid
	15	0,457	0,329	Valid
	16	0,642	0,329	Valid
	17	0,642	0,329	Valid

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 17 pertanyaan tentang metode dukungan dinyatakan penting. Hal-hal pernyataan diumumkan secara substansial dengan alasan bahwa nilai r hitung $\geq r$ dasar, sehingga pertanyaan dalam jajak pendapat Kelompok 1 dapat digunakan untuk bahan survei tambahan untuk diteliti sebagai informasi eksplorasi.

Tabel 5. Tabel asisten harga Pearson Second r lanjutan

Variabel	Nomor	R Hitung	R Tabel	Keputusan
Kuantitas	1	0,573	0,329	Valid

Kerja	2	0,457	0,329	Valid
	3	0,542	0,329	Valid
	4	0,528	0,329	Valid
	5	0,443	0,329	Valid
	6	0,553	0,329	Valid
Kualitas Kerja	7	0,528	0,329	Valid
	8	0,336	0,329	Valid
	9	0,578	0,329	Valid
	10	0,398	0,329	Valid
	11	0,548	0,329	Valid
	12	0,534	0,329	Valid
Ketepatan Waktu	13	0,556	0,329	Valid
	14	0,815	0,329	Valid
	15	0,624	0,329	Valid
	16	0,578	0,329	Valid
	17	0,815	0,329	Valid

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 17 pertanyaan tentang metode dukungan dinyatakan penting. Hal-hal pernyataan dinyatakan sah karena nilai r hitung $\geq r$ dasar, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam jajak pendapat Kelompok 2 dapat digunakan untuk bahan survei tambahan untuk diuraikan sebagai informasi eksplorasi.

1. Tes Ketergantungan

Arikunto (2010: 215) mengatakan bahwa kehandalan akan menunjukkan bagaimana suatu alat dapat cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan informasi karena alat tersebut bagus, sebuah survei seharusnya solid dengan asumsi jajak pendapat. memiliki tingkat kepastian yang tinggi dan memiliki keamanan atau presisi. Karena dalam penelitian ini skor yang digunakan bukan 1 dan 0, melainkan skala 1-5, maka untuk mencari keterandalan dalam

penelitian ini menggunakan persamaan Koefisien Alpha (Cronbach Alpha), khususnya:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_1^2}{\sigma_1^2} \right]$$

r_{11}	=	Reliabilitas instrumen
k	=	Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
$\sum \sigma_1^2$	=	Jumlah varian butir
σ_1^2	=	Varian Total

Setelah diperoleh nilai Koefisien Alpha (Cronbach's Alpha), nilai tersebut dikontraskan dengan nilai r tabel. Jika nilai $\alpha > r$ tabel, maka penyelidikan dapat diandalkan. Bergantian, jika nilai $\alpha < r$ tabel, artikulasinya tidak kuat. Uji keandalan instrumen/jajak pendapat ditangani dengan menggunakan program komputer sukses dan SPSS (Measurable Item and Administration Arrangements). Hasil tes harus terlihat di tabel:

Tabel 6. Hasil uji keandalan instrumen

Variabel	Item	Cronbach's Alpha (r hitung)	r tabel	Keputusan
Kelompok 1	17	0,762	0,329	Reliabel
Kelompok 2	17	0,696	0,329	Reliabel

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini strategi pemeriksaan informasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan kuantitatif. Suatu strategi atau metode

pemeriksaan yang diselesaikan dengan menggunakan resep-resep terukur yang kemudian akan diuraikan menjadi kalimat-kalimat. Metode pemeriksaan yang digunakan adalah wawasan yang memukau dan pengukuran inferensial.

1. Pengukuran Grafis

Menurut (Sugiyono, 2008) pencerahan wawasan adalah ukuran yang digunakan untuk membedah suatu informasi dengan menggambarkan atau menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan untuk apa nilainya tanpa mengharapkan untuk membuat tujuan umum atau spekulasi. Informasi tersebut berasal dari tanggapan responden melalui jajak pendapat tentang hal-hal tersebut dan akan diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan kemudian memberikan klarifikasi.

2. Pemeriksaan diskriminan

Sesuai Cramer, Berbagai Pemeriksaan Diskriminan adalah prosedur parametrik yang digunakan untuk menentukan bobot indikator terbaik untuk mengidentifikasi setidaknya dua kumpulan kasus, yang tidak terjadi secara kebetulan. Model pemeriksaan diskriminan dijelaskan oleh komponen yang luar biasa, khususnya informasi variabel dependen yang seharusnya merupakan informasi yang benar, sedangkan informasi bebas adalah informasi yang tidak jelas. Atau sekali lagi, pemeriksaan diskriminan adalah strategi untuk memecah informasi yang memiliki faktor subordinat sebagai kelas dan faktor bebas sebagai pengukuran.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

$$Y1 = X1 + X2 + X3 + \dots + Xn$$

Di mana :

1. Autonomous Elements (X1, dst.) merupakan data metrik, khususnya data pada skala jangkauan atau jangkauan.
2. Variabel dependen (Y1) adalah data asli. Jika data sebenarnya hanya terdiri dari 2 kode, ini disebut "Pemeriksaan Diskriminan Kelompok Ganda". Namun jika terdapat pengelompokan yang berbeda-beda, maka disebut dengan "Pemeriksaan Diskriminan Berbeda".

Variabel dependen dari penilaian diskriminan dikenal sebagai kelas tindakan à (jelas/ordinal) di belakang dikenal sebagai variabel pemalsu (hanya 2 pengelompokan, namun beberapa penokohan dapat dibuat). Sedangkan variabel bebasnya disebut *predicto à range/extent*.

A. Berbagai Model Penilaian Diskriminan

Jenis Ujian Diskriminan Campuran Langsung:

$$D = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Di mana :

$$D = \text{Skor Diskriminan}$$

B = Koefisien isolasi atau bobot X = Pointer atau Variabel Bebas

B. Inspirasi yang mendorong Ujian Segregasi Itu Unik

Inspirasi mengemudi Ujian Diskriminan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hal yang mana (responden) yang memiliki tempat dengan kelompok kelas yang mana.
2. Uji apakah ada perbedaan utama antara class dan pointer
3. Cari tahu penanda mana yang ditambahkan ke perbedaan antara pertemuan.

Dalam komposisi yang berbeda alasan penilaian diskriminan adalah:

1. Menganalisis apakah ada perbedaan besar antara kumpulan sehubungan dengan faktor bebas
2. Memilah faktor mana yang memberikan tanggung jawab terbaik terhadap perbedaan yang terjadi antar pertemuan
3. Minta setiap peti ke dalam kelompok berdasarkan nilai penanda
4. Penilaian ketepatan pengaturan

C. Asumsi Penilaian Diskriminan

Asumsi besar yang harus dipenuhi agar model diskriminan dapat digunakan meliputi:

1. Faktor-faktor bebas harus disampaikan dengan cara yang luar biasa (kehadiran kecenderungan). Jika data tersebut biasanya tidak dialirkan, ini

akan menimbulkan masalah dengan ketepatan kapasitas (model) diskriminan. Pengulangan terhitung dapat digunakan sebagai teknik elektif jika data tidak tersebar sesering mungkin.

2. Sistem kovarian semua faktor bebas benar-benar sama.

3. Tidak ada multikolinieritas (tidak ada hubungan) antar elemen independen. Jika kedua faktor bebas tersebut memiliki luasan yang solid untuk a, keduanya dikatakan memiliki multikolinearitas.

4. Tidak ada data yang absurd (ketidakberesan). Berharap ada data kasus khusus yang tidak tertangani, hal ini dapat menyebabkan penurunan akurasi pengaturan kapasitas diskriminan.

D. Siklus Penilaian Diskriminan

Beberapa instrumen yang mengandung pola pemeriksaan diskriminan yang signifikan meliputi:

1. Urutkan variabel menjadi elemen bawahan dan elemen independen.
2. Cirikan teknik untuk membuat kapasitas diskriminan, secara eksplisit:
 - Penilaian Simultan; setiap variabel dirakit dan setelah itu siklus diskriminan selesai.
3. Penilaian Langkah Cerdas; faktor ditetapkan secara terpisah ke dalam model diskriminan. Dalam siklus ini, jelas terdapat faktor-faktor yang tetap berada dalam model dan dimungkinkan tidak kurang dari satu variabel bebas yang dikeluarkan dari model.
4. Menguji signifikansi kapasitas diskriminan struktur, menggunakan uji

Wilk's Lambda, Pilai, F, dan lain-lain.

5. Menguji ketepatan pengumpulan kapasitas diskriminan (secara eksplisit dengan Casewise Diagnostics).

6. Pilihan kapasitas diskriminan pher.

7. Mainkan tes pengaturan kapasitas diskriminan.

Dengan penilaian diskriminan, pada akhirnya akan dibuat model seperti backslide, khususnya satu variabel ekologis dan banyak elemen independen. Standar diskriminan adalah membuat model yang secara jelas dapat menunjukkan perbedaan (partisi) antara hal-hal dalam variabel dependen.

3.7. Pengujian Hipotesis

1. H_0 : Tidak ada efek buruk dari Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pelaksanaan delegasi.

H_1 : Terdapat pengaruh yang luar biasa besar dari Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pelaksanaan kepegawaian.

2. $\alpha = 0,05$

3. Daerah basis: H_0 dikecualikan jika p menganggap (Sig.) $< 0,05$.

4. Dalam hal p hal (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 diberhentikan dengan menyatakan bahwa ada pengaruh dasar Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap eksekusi ketenagakerjaan. Kemudian lagi, menerima p hal (Sig.) $> 0,05$ maka H_1

ditolak dengan maksud bahwa tidak ada perbedaan yang besar antara pelaksanaan delegasi sebelum Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelaksanaan khusus setelah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Eksekusi.).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Memperhatikan hasil perbincangan terkait Efek Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kerja Perdagangan Modern dan Propinsi Sumatera Utara yang bertumpu pada spekulasi (Dharma, 2003). : 355), dimana terdapat 3 bagian eksekusi, khususnya kuantitas jabatan, gagasan karya dan optimisme, dapat diselesaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan perpanjangan pelaksanaan mengenai kuantitas jabatan.
2. Pelaksanaan Tata Kelola Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan perkembangan pelaksanaan terkait kualitas pekerjaan.
3. Pelaksanaan Tata Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan secara optimis.
4. Pelaksanaan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan perkembangan pemikiran pelaksanaan itu sebagai sebagian dari pelaksanaan bisnis.

5.2. Pikiran

Arah pada perkembangan ilmu pengetahuan dan klien utilitarian. Menilik hasil pengujian tersebut, pencipta mengemukakan beberapa pemikiran mengingat adanya spekulasi (Dharma, 2003: 355), di mana terdapat 3 komponen

pelaksanaan, yaitu seberapa banyak karya, gagasan karya dan visi. , pikiran pemeriksaan tambahan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kajian perbandingan dengan metodologi dan strategi yang digunakan oleh kabupaten yang benar-benar telah melaksanakan sistem pemerintahan yang disusun secara elektronik dalam rangka pemerintahan yang terbuka dan langsung.
2. Investigasi tantangan dan hambatan dalam menjalankan struktur pemerintahan berbasis elektronik dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut.
3. Penelitian tentang kemungkinan struktur keamanan dan asuransi data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta menyusun metodologi untuk memperkuat keamanan dan keamanan data.
4. Pemeriksaan yang relevan terhadap pelaksanaan struktur e-government di tingkat pemerintah lingkungan, misalnya, jaringan provinsi/metropolitan, dan penilaian terhadap jangkauannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menawarkan jenis bantuan terbuka yang lebih baik.
5. Penelitian pemanfaatan kemajuan blockchain dalam struktur pemerintahan berbasis elektronik, dan pengaruhnya terhadap kemudahan dan kewajiban pemerintah.
6. Penelitian karena struktur pemerintah acara sosial-elektronik mengenai kepentingan politik yang berkembang dan tajuk berbasis prevalensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Good E-Government Tansparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Bayumedia Publishing. Malang
- Azis, Herry Abdul. 2008. *Integrasi e-Government: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi*. Seminar Pelayanan Publik dan E-government, Bappenas, Jakarta .
- Budiati, Ayuning. 2003. *Improving E-government Implementation to Enhance Publik Service Delivery in Indonesia* Monash University. Australia
- Bappenas 2003. *Pelayanan Publik Di Era Desentralisasi: Studi Tentang Variasi Cakupan dan Peranan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dharma, Surya. 2003. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep Teori dan Problema Pelayanan Publik)*, Penerbit Lembaga Penelitian Unila, Bandar Lampung
- Dwiyanto, Agus & Kusumasari. 2001. *Policy Brief : Kinerja Pelayanan Publik, Edisi 1,2,3 &4/PB/2001*, Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan, Yogyakarta .
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government in action*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPM. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* . BPFE. Yogyakarta
- Mangkunegara, P. Anwar. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kesepuluh. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pasolong. H. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. CV. Alfabeta. Bandung.

- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta .
- Sinambela. L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*, cetakan kelima. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan ke-3, Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung .
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Thoha, Miftah.2003. *Perpektif Perilaku Birokrasi*. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tjiptono Fandy, 2014. *Pemasaran jasa*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Universitas Lampung. 2011. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.

Jurnal/ Artikel

- Achmad Habibullah, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government” Tahun 2010, Volume 23, Nomor 3 Hal: 187-195*
- Dwi Wahyu Prasetyono & Putu Aditya Ferdian Ariawantara, *Kebijakan Politik Electronic Government, Pelayanan Publik Atau Kepentingan Politis? (Studi Deskriptif Implementasi E-KTP di Kota Surabaya)” Governance Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 3, No.1 April 2012:12-23*
- Habibullah, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government, (Jurnal) Volume 23 No. 3, Juli– September 2010.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Tentang Pedoman Pelayanan Publik

